



TRANSISI KEKUASAAN DARI SBY KE JOKOWI

Indra Pahlevi*)

Abstrak

Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019 pada Pemilu Presiden 2014 berinisiatif membentuk Kantor Transisi guna memetakan, merencanakan, dan mengimplementasikan visi dan misi saat kampanye untuk dituangkan ke dalam strategi dan program aksi pada pemerintahan mendatang. Kantor Transisi juga bertugas melakukan komunikasi dengan Pemerintahan Presiden SBY sebelum dilaksanakannya pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih. Dalam prosesnya, upaya ini mengalami ketidakmulusan komunikasi antara kedua belah pihak. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi arti dari proses transisi yang dibangun dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan baru sehingga ada keberlanjutan sekaligus pembaruan pembangunan secara lebih soft. Tulisan ini mengkaji transisi kekuasaan dari SBY ke Joko Widodo dengan menggunakan konsep sistem pemerintahan presidensial. Proses transisi kekuasaan ini dapat menjadi sebuah terobosan politik dan tradisi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga tradisi ini bisa dilembagakan baik dalam bentuk konvensi kenegaraan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pendahuluan

Pemilu Presiden tahun 2014 telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden baru untuk masa jabatan tahun 2014 – 2019 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah menjabat 2 (dua) periode sejak tahun 2004. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Drs. H.M. Jusuf Kalla (JK) terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 lalu yang dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Agustus 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019 setelah menggelar sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Presiden terpilih Jokowi bergerak cepat untuk mempersiapkan jalannya roda pemerintahan yang akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang seiring berakhirnya masa jabatan Presiden SBY dan pada saat yang bersamaan Presiden terpilih Jokowi mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Sehari setelahnya Wakil Presiden terpilih JK juga akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang MPR RI.

Upaya gerak cepat Presiden terpilih Jokowi diwujudkan dalam pembentukan

*) Peneliti Madya Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: indra.pahlevi@dpr.go.id.



Kantor Transisi yang diresmikan tanggal 4 Agustus 2014 guna memetakan, merencanakan berbagai konsep dalam rangka memudahkan implementasi program-program kerja Jokowi dan JK termasuk postur kabinet yang hendak dibentuk. Beberapa tokoh ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi pengelola Kantor Transisi tersebut dipimpin oleh Rini Soemarno didampingi oleh 4 (empat) deputi yaitu Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Akbar Faisal, dan Andi Widjajanto. Menurut Jokowi, penunjukan ini didasarkan atas kebutuhan dan bukan perwakilan dari kekuatan politik pendukung sehingga tidak mencerminkan perwakilan partai politik pengusung pasangan Jokowi – JK meskipun dalam pelaksanaan pekerjaannya Tim ini menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk para relawan.

Selanjutnya Kantor Transisi akan berkomunikasi dengan Pemerintahan Presiden SBY yang didahului oleh pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden terpilih Jokowi di Bali tanggal 27 Agustus 2014 dan dilanjutkan untuk kedua kalinya pada minggu kedua September 2014 ini. Dalam perjalanannya memang ada ketidakmulusan komunikasi antara kedua pihak. Namun hal ini tidak mengurangi arti dari proses transisi yang dibangun dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan baru, sehingga ada keberlanjutan sekaligus pembaruan pembangunan secara lebih soft dan juga menjadi tradisi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Sistem Presidensial dan Tradisi Baru di Indonesia

Secara konseptual, sistem pemerintahan presidensial cenderung memisahkan kepala eksekutif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Carlton Clymer Rodee dkk. menyatakan bahwa salah satu ciri dari sistem presidensial ini adalah sangat sedikitnya sarana yang dapat mengembangkan komunikasi antara badan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, dalam prakteknya berkembang hubungan-hubungan atau pola komunikasi informal antar-kekuatan politik khususnya dengan kekuatan politik di parlemen (koalisi atau oposisi) yang menguasai DPR. Dalam keadaan demikian, penyusunan kebijakan pastilah menjadi fungsi kompromi politik dan terjadi tawar-menawar antar-kekuatan politik tersebut terutama antara Presiden (eksekutif) dan legislatif. Oleh karena itu, secara teoritis sistem presidensial ini lebih dekat dengan model pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Dalam konteks Indonesia, pola komunikasi menjadi sangat penting baik antara presiden dan DPR maupun antara presiden (pemerintahan) sebelumnya dan presiden baru (pemerintahan berikutnya). Hal itu karena sistem presidensial membutuhkan adanya kesinambungan pemerintahan tanpa jeda satu menitpun. Apalagi dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi presiden terpilih dengan syarat tertentu menjadi sangat kuat dan tidak bisa dengan mudah dijatuhkan di tengah jalan pada masa pemerintahannya oleh siapapun termasuk DPR (badan legislatif).

Sebagaimana lazimnya sistem presidensial di dunia, presiden terpilih berhak memilih para menteri di kabinetnya yang kita kenal sebagai hak *prerogative* meskipun di beberapa negara ada yang harus mendapat persetujuan parlemen seperti di Amerika Serikat untuk jabatan-jabatan tertentu seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Jaksa Agung. Semua menteri tersebut hanya bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan semua pekerjaan dan tanggungjawabnya. Oleh karena itulah presiden terpilih hasil pemilu presiden 2014 lalu, Jokowi melakukan upaya yang secara konseptual belum pernah dilakukan di Indonesia pada saat transisi kekuasaan dari presiden sebelumnya kepada presiden baru.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu Presiden berlangsung tanggal 9 Juli 2014 dan kemudian keputusan akhir terjadi tanggal 21 Agustus 2014 dengan keluarnya Putusan MK tentang PPHU Presiden dan Wakil Presiden, sementara pengucapan sumpah/janji presiden terpilih akan berlangsung tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. Artinya, terdapat jeda sejak pemilu hingga pengucapan sumpah/janji sekitar 3 setengah bulan. Masa inilah yang memang harus dijadikan sebuah momentum untuk peralihan kekuasaan---terutama saat presiden terpilih bukan *incumbent*---guna kesinambungan pemerintahan. Hal ini menjadi tradisi politik baru yang positif yang dapat dilembagakan di kemudian hari, apalagi jika siklus APBN tidak berubah.

Dalam siklus APBN, Presiden menyampaikan nota keuangan atau pengantar RAPBN tahun berikutnya tanggal 15 atau 16 Agustus dan selanjutnya akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah dalam kurun waktu sekitar 2 setengah bulan atau sekita akhir Oktober/awal November RAPBN disahkan menjadi APBN. Padahal periode keanggotaan DPR akan berakhir tanggal 30

September dan sejak 1 Oktober akan berganti dengan keanggotaan baru. Kondisi ini memang harus menjadi perhatian ke depan agar tidak terjadi kondisi yang saling menyandera antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru.

Persoalan di atas itulah yang menjadi salah satu fokus dari Kantor Transisi Jokowi –JK. Sebagaimana diketahui bahwa ada 13 Kelompok Kerja (Pokja) ditambah tiga unit yang akan menyusun usulan rencana pemerintahan ke depan. Tiga unit itu adalah unit APBN, unit Revolusi Mental, kemudian ada unit Komunikasi Politik. Adapun target penyelesaian adalah tanggal 15 September 2014 dan akan dilaporkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi- JK.

Proses Transisi Yang Berlangsung

Seperti sudah dikemukakan di depan bahwa tanggal 27 Agustus 2014 lalu Presiden SBY bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Bali dalam upaya memuluskan proses transisi yang berlangsung. Secara tegas keduanya menyatakan ini merupakan bagian dari komunikasi politik yang harus dibangun dengan tetap saling menghargai posisi masing-masing. Langkah berikutnya adalah akan ditindaklanjuti oleh anggota kabinet serta Kantor Transisi Jokowi – JK guna membicarakan lebih detil atas beberapa hal yang penting seperti postur anggaran yang saat ini masih dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Presiden SBY menegaskan bahwa pertemuan itu tidak menghasilkan *deal* politik tertentu di luar pembicaraan yang terkait proses transisi. Bahkan SBY menegaskan bahwa hingga 20 Oktober 2014, seluruh proses pemerintahan masih berada dibawah tanggungjawabnya.

Dalam proses berikutnya memang terjadi ketegangan antara kabinet dan Tim Transisi. Bahkan Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat bahwa segenap komunikasi Tim Transisi harus melalui 3 (tiga) Menko yang ada dan tidak bisa langsung berkomunikasi kepada menteri teknis. Surat itu keluar disebabkan juga oleh kekesalan Presiden SBY kepada Tim Transisi yang dinilai agak “kebablasan” dalam melakukan komunikasi serta mengusulkan berbagai hal. Beberapa sebab itu antara lain karena pembentukan Tim Transisi dilakukan sebelum adanya Putusan MK tentang PHPU, sehingga kesannya mendahului proses. *Kedua*, karena isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang seolah-olah harus dinaikkan oleh pemerintahan SBY dan jika tidak, maka akan membebani pemerintahan Jokowi, dan *ketiga*,

karena pola komunikasi Tim Transisi yang langsung menemui kementerian teknis tanpa melalui Menko.

Atas kondisi tersebut, pihak Tim Transisi sudah mengklarifikasi bahwa setiap hendak berkomunikasi, Tim Transisi selalu mengirimkan surat terlebih dahulu yang ditandatangani oleh Jokowi. Namun demikian Jokowi berterima kasih atas kritikan Presiden SBY. Hal itu semua karena para anggota Tim Transisi memiliki semangat yang tinggi guna cepatnya penyiapan proses transisi pemerintahan. Progres yang terjadi adalah pada Rabu, 10 September 2014 ini Tim dari Kantor Transisi akan bertemu dengan pemerintahan Presiden SBY di Kantor Menko Perekonomian guna membahas apa saja yang menjadi agenda dari Pemerintahan Presiden terpilih Jokowi yang digodok oleh Tim Transisi.

Dari semua proses yang berlangsung, meskipun terdapat beberapa ketidakmulusan, secara umum ada tujuan yang hendak dicapai guna penyelenggaraan pemerintahan yang berkesinambungan. Apalagi proses pembahasan RAPBN Tahun 2015 masih berlangsung dan hampir dipastikan tidak akan selesai hingga akhir September 2014 ini. Atas kondisi tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan prioritas program presiden terpilih Jokowi dan sesuai dengan visi misi kampanye pasangan Jokowi –JK saat pemilu presiden berlangsung beberapa waktu lalu.

Hasil lain yang hendak dicapai adalah terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien melalui postur kabinet yang dirancang oleh Kantor Transisi Jokowi–Jusuf Kalla. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat tiga opsi postur kabinet Jokowi yang digodog oleh Kantor Transisi yaitu tetap 34 kementerian tetapi dengan perubahan. Opsi kedua adalah 27 kementerian dengan merujuk pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan komposisi ada tiga menko dan beberapa kementerian wajib seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri. Opsi ketiga terdapat dua pilihan yakni 20 kementerian atau 24 kementerian. Dalam postur ini banyak dibahas isu-isu maritim dan penggabungan urusan pangan, pertanian dan perkebunan. Atas berbagai opsi tersebut, Presiden terpilih Jokowi

menyatakan akan merampungkannya sekitar pertengahan September 2014.

Melalui proses transisi dan pola komunikasi yang dilakukan tersebut diharapkan agar pemerintahan baru langsung bekerja sesaat setelah pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih serta kabinet terbentuk. Tidak ada lagi istilah “bulan madu” atau adaptasi dari presiden/wakil presiden baru beserta kabinetnya. Harus langsung tancap gas dalam menangani berbagai persoalan bangsa.

Penutup

Proses transisi pemerintahan dari Presiden SBY kepada Presiden Jokowi harus diapresiasi sebagai sebuah terobosan politik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Proses ini lebih didasarkan pada *political will* kedua pihak atau karena sifat kedua pemimpin tersebut yang *humble*. Namun demikian, harus disadari bahwa proses seperti ini dapat menjadi tradisi positif untuk periode selanjutnya terutama dari presiden yang tidak akan menjabat pada periode berikutnya baik karena habis periode kedua jabatannya secara konstitusional maupun karena kekalahannya dalam pemilihan periode kedua masa jabatannya sebagai presiden.

Tradisi positif ini menjadi penting karena sistem presidensial memang memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk mengimplementasikan visi misi dan programnya. Apalagi sejak era reformasi, di mana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak diadakan lagi meskipun sekarang ada UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka harus dibuat sebuah proses transisi yang lunak antar pemerintahan melalui proses komunikasi yang baik tanpa harus saling menyalahkan atau menyudutkan satu sama lain.

Ke depan harus dipertimbangkan tradisi ini menjadi konvensi ketatanegaraan di Indonesia guna lebih tertata proses pembangunan yang berlangsung. Bahkan tradisi ini bisa dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Satu hal yang mungkin kita harus pikirkan adalah kehadiran UU tentang Kepresidenan yang memuat berbagai hak dan kewajiban presiden yang lebih rinci daripada apa yang diatur dalam Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Salah satu muatannya adalah bagaimana proses transisi berlangsung sebagaimana saat ini kita

saksikan.

Semua hal yang dilakukan oleh para pemimpin kita tersebut tidak lain semata ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Semoga pemimpin kita selalu amanah dan tidak melakukan tindakan yang melukai rakyat.

Rujukan

Carlton Clymer Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/06/078604886/Tiga-Sebab-Ini-Bikin-SBY-Kesal-pada-Tim-Transisi>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://news.detik.com/read/2014/09/07/160515/2683656/10/ini-tanggapan-jokowi-soal-kritikan-sby-terhadap-tim-transisi>, diakses tanggal 8 September 2014.

<https://id.berita.yahoo.com/dipo-alam-perintahkan-tolak-kedatangan-tim-transisi-010133930.html>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://news.detik.com/read/2014/09/05/143906/2682425/10/jokowi-akan-kembali-bertemu-sby-kemungkinan-pekan-depan>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/02/285890/bertemu-dengan-jokowi-di-bali-sby-tidak-ada-deal-politik-apapun> (akses 8 september 2014)

<http://www.jokowi.id/berita/rencana-kerja-kantor-transisi-jokowi-jk-sebulan-ke-depan>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://www.jokowi.id/berita/rumah-transisi-jokowi-jk-diresmikan/>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://www.jpnn.com/read/2014/08/25/253715/Inilah-Tiga-Opsi-Postur-Kabinet-Jokowi-JK->, diakses tanggal 9 September 2014.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/09/jokowi-sebut-postur-kabinetnya-akan-selesai-pertengahan-september>, diakses tanggal 8 September 2014.

<http://www.beritasatu.com/politik/208378-rabu-tim-transisi-bertemu-pemerintah-di-kemko-perekonomian.html>, diakses tanggal 8 September 2014.